



## PEMBERDAYAAN GURU BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SMK-RSBI) DI INDONESIA

Wasimin

### ABSTRACT

*The existence of international level of vocational schools is really needed to educate and prepare Indonesian human resources. The availability of competent English teachers is very essential. Nevertheless, it still becomes a very serious problem faced by those schools in Semarang. The purpose of the study is to identify the empowering of the English teachers at some teacher training institutions and vocational schools. Qualitative method with exploratory and explanatory was employed to conduct the study. The key informant was the leader of each institution. Observation, interview, document analysis were employed. Some policies and activities were held to empower the English teachers of those schools such as training, workshop, block grant. However, they were still partial and temporary. It is still required some more relevant and comprehensive models to empower them.*

**Keywords** : *international level of vocational schools, competent English teachers, empowering.*

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya saingnya dalam percaturan politik, ekonomi, hukum, budaya, dan

---

Alamat Korespondensi:  
SMA 3 Semarang  
Email:wasmaga@yahoo.com

pertahanan pada tata kehidupan masyarakat dunia global. Peningkatan daya saing suatu bangsa memerlukan kualitas SDM yang prima. Negara-negara yang memiliki tingkat kompetisi terbaik di dunia selalu didukung oleh kualitas SDM yang juga terbaik. Menurut Suyanto (2001:5), ada kecen-

derungan yang amat jelas bahwa negara maju semakin meningkatkan investasinya dalam dunia pendidikan. Semakin intensif melakukan investasi dalam dunia pendidikan, semakin meningkat daya saing mereka. Dikmenjur (2008:6) menyatakan Swiss, Finlandia, dan Swedia yang menempati tiga besar dalam *The Global Competitiveness Report 2006-2007* merupakan contoh utama bagaimana struktur tenaga kerja yang trampil, pembelajar memiliki kontribusi besar bagi kesuksesan sebuah bangsa.

Pentingnya peran pendidikan yang bermutu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin disadari. Pasal 5 (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), telah memiliki komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif.

Dalam upaya menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, Depdiknas berupaya agar setiap individu memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan utuh. Hal itu diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga pilar ini diyakini akan mampu secara berkesinambungan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional Indonesia.

Pendidikan kejuruan, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan jenis pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM yang kompetitif. SDM yang kompetitif mengandung makna SDM yang terampil. SDM yang terampil terlibat secara langsung dalam produksi barang atau jasa, sehingga keberadaannya sangat penting dan strategis dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi. SDM yang terampil memiliki peluang yang besar untuk bekerja dan produktif yang pada gilirannya akan memperkuat kemampuan

ekonomi negara dan merupakan faktor keunggulan menghadapi persaingan global.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan SMK adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Direktorat Pembinaan SMK saat ini telah memperbaharui visi dan misinya agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Permintaan pasar terhadap tenaga kerja yang mampu berkompetisi di era globalisasi membuat visi lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan SDM berkelas dunia serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Visi ini dijalankan melalui misi berupa peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan kejuruan sebagai pusat pembudayaan kompetensi bertaraf internasional.

Sebagai penggerak dan pendorong terwujudnya SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global, SMK harus memiliki sasaran dan program yang jelas. Direktorat Pembinaan SMK (2008:16)

menetapkan beberapa sasaran utama untuk mewujudkan SMK yang mampu menjawab tuntutan persaingan global. Salah satu program penting dalam bidang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing adalah perintisan SMK bertaraf internasional yang pada akhir tahun 2010 harus mencapai jumlah 441 SMK, di samping mendorong SMK untuk melakukan kerjasama dengan institusi luar negeri, hingga praktek kerja industri di luar negeri.

Kebijakan perintisan SMK-BI (Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional) merupakan amanat pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi landasan hukum dikembangkannya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Menurut Slamet (2008:10), visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif berskala nasional dan internasional, sedangkan misinya adalah mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif berskala nasional dan

internasional dan mampu berkolaborasi secara global.

Untuk mempercepat pencapaian profil SMK-BI, berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, masing-masing SMK harus memiliki strategi untuk melakukan inovasi dan pengembangan sekolah. Kepala sekolah diharapkan mampu memberdayakan semua potensi yang ada untuk mendukung suksesnya SMK-BI tersebut. Terkait standar pendidikan, Direktorat Pembinaan SMK (2008:5) menggariskan bahwa SMK-BI menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan sertifikat kompetensi standar internasional pada satu atau lebih program keahlian dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris untuk empat (4) mata diklat.

Agar mampu menyelenggarakan layanan pendidikan SMK-BI ini, SMK harus memahami prinsip-prinsip pengembangan SBI. Menurut Slamet (2008:22), salah satu prinsip pengembangan SBI adalah dimilikinya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tangguh. Lebih lanjut Slamet menyatakan bahwa salah satu strateginya adalah menyiapkan

penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan guru bahasa Inggris SMK (SMK BI) di berbagai institusi pelatihan dan sekolah selama ini. Adapun ruang lingkup penelitian meliputi: a) institusi-institusi pelatihan, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah dan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bahasa di Jakarta, dan b) Sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) penyelenggara RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di Kota Semarang, yaitu SMKN 4 Semarang, SMKN 6 Semarang, SMKN 7 Semarang, dan SMKN 11 Semarang.

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *exploratory* dan *explanatory*. Fokus studi ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan guru bahasa Inggris SMK-RSBI yang dilakukan oleh berbagai institusi pelatihan dan sekolah. Latar studinya adalah LPMP Jawa Tengah, PPPPTK (P4TK)

Bahasa Jakarta, SMKN 4 Semarang, SMKN 6 Semarang, SMKN 7 Semarang, dan SMKN 11 Semarang dan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2008. Informan kuncinya adalah pimpinan masing-masing institusi tersebut. Pemilihan informan lain ditunjuk oleh informan kunci yang dipandang relevan untuk memberikan informasi.

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, daftar isian, dan analisis dokumen. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, simpulan, dan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Keberadaan dan keberdayaan SDM, khususnya guru dalam konteks peningkatan mutu pendidikan secara umum dan SMK-BI khususnya sangat penting dan strategis. Sebagai suatu sistem, pendidikan atau sekolah tersusun dari lima (5) komponen, yaitu konteks, masukan, proses, keluaran, dan hasil. Menurut Suparlan (2008:61), guru merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang penting dalam sistem pendidikan ini.

Abdul Malik Fajar, sebagaimana dikutip Suparlan (2008:99) menegaskan bahwa mutu pendidikan amat ditentukan oleh mutu gurunya. Guru adalah yang utama. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling penting adalah meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan men-cerdaskan yang hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. Harris (1990:13) juga menegaskan bahwa guru memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan dan pemberian layanan pendidikan yang bermutu.

Jelaslah bahwa guru merupakan jantung kegiatan pendidikan. Pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. UNESCO, sebagaimana dikutip Hartoyo (2008:3), dalam laporan *The International Commission on Education for 21st Century* menyatakan bahwa memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung pada perbaikan guru.

Upaya mewujudkan guru yang profesional yang diletakkan atas kesadaran bahwa guru

merupakan ujung tombak pembangunan bidang pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Bahkan, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menurut analisis beberapa pakar pendidikan juga disebabkan kurangnya peran/rendahnya kualitas guru kita (Suparlan, 2008:91).

Uji bahasa Inggris yang menggunakan tes TOEIC (*Test of English for International Communication*) untuk 76 orang guru bahasa Inggris SMK Jawa Tengah dalam program diklat guru SMK penerima subsidi imbal swadaya pemberdayaan SMK berstandar nasional menuju standar internasional yang diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, dan LPMP Jawa Tengah menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan.

Berdasarkan kriteria yang ada, rata-rata nilai peserta adalah 509,15 (termasuk kriteria *intermediate* 1+ nilai antara 405-600). (LPMP Jawa Tengah, 2005). Padahal, dalam instrumen evaluasi diri SMK-RSBI dinyatakan bahwa guru bahasa Inggris memiliki skor TOEIC lebih dari 550. (Dit.PSMK,

2007:6). Hasil uji tersebut memang belum menjamin terpotretnya kompetensi guru bahasa Inggris secara komprehensif, namun telah dapat menunjukkan bahwa mutunya belum menggembirakan.

Dalam uji seleksi calon guru pemandu Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD) bahasa Inggris SMK tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan LPMP Jawa Tengah tahun 2008 menunjukkan hasil yang mengejutkan. Nilai rata-rata dari materi yang diujikan yang meliputi tes bahasa Inggris, kepribadian, pedagogik, dan TPA (Tes Potensi Akademik) adalah 57,496. Peserta seleksi merupakan guru-guru bahasa Inggris terbaik yang dimiliki kabupaten/kota se-Jawa Tengah, termasuk guru bahasa Inggris di SMK-BI. Padahal guru pemandu nantinya dipersiapkan untuk membimbing para guru bahasa Inggris yang lain di kabupaten/kota masing-masing dalam peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan data dan kajian sebagaimana dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas guru SMK, termasuk guru bahasa Inggris SMK-BI belum menggembirakan

seperti yang diharapkan. Padahal dalam rangka penyelenggaraan SMK-BI para guru bahasa Inggris diharapkan memiliki kontribusi yang tinggi. Selain memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, guru bahasa Inggris harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial yang baik.

Dengan berpedoman pada konsep  $SBI = SNP + X$  (Slamet, 2008:4), guru bahasa Inggris diharapkan mampu memberikan penguatan, penguasaan, perluasan, pendalaman, penambahan, dan/atau pengembangan terhadap SNP (Standar Nasional Pendidikan). Konsep ini juga sejalan dengan prinsip dan acuan operasional pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, di samping tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta dinamika perkembangan global. (<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=panduan+penyusunan+ktsp&meta=.12-2008>).

Makna lain dari kajian ini adalah perlunya upaya pember-

dayaan guru bahasa Inggris pada SMK-BI. Upaya pemberdayaan dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian guru bahasa Inggris yang berkualitas. Menurut Mukhtar (2003:43), semakin seorang guru memiliki kemandirian, ia semakin mampu mengoptimalkan kinerja dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam mengoptimalkan kinerja guru, terdapat beberapa pihak yang berperan. Selain guru itu sendiri untuk memiliki kemauan berubah, pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas guru dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan nasional juga berperan.

Menurut Depdiknas (2006:3), SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya inter-nasional, sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dengan pengertian ini, SBI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SBI = SNP + X$$

di mana SNP adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana pengelolaan, dan penilaian. Sedangkan X merupakan penguatan, penguasaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional.

Diharapkan lulusan SBI selain menguasai SNP Indonesia, juga menguasai kemampuan-kemampuan kunci global agar setara dengan mereka dari negara-negara maju. Oleh karena itu, pengakraban peserta didik terhadap nilai-nilai progresif yang diunggulkan dalam era global perlu digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SBI. Nilai-nilai progresif tersebut akan dapat mempersempit kesenjangan antara Indonesia dan negara-negara maju khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi.

Mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi Depdiknas, maka visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia

yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Visi tersebut berimplikasi bahwa penyiapan manusia bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif, terarah, terencana, dan sistematis agar dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, damai, dihormati, dan diperhitungkan bangsa-bangsa lain.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi SBI adalah mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global. Misi ini direalisasikan melalui kebijakan, rencana, program, dan kegiatan SBI yang disusun secara cermat, tepat, futuristik, dan berbasis *demand-driven*.

SBI merupakan upaya sadar, intens, terarah, dan terencana untuk mewujudkan citra manusia ideal yang memiliki kemampuan dan kesanggupan hidup secara lokal, nasional, regional dan global, maka perlu dirumuskan standar SBI yang mencakup input, proses, output. Input penyelenggaraan SBI yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bertaraf internasional meliputi siswa baru

(intake) yang diseleksi secara ketat dan masukan instrumental seperti kurikulum, pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, dan lingkungan sekolah.

Kurikulum diperkaya (diperkuat, diperluas, dan diperdalam) agar memenuhi standar isi SNP dan kurikulum bertaraf internasional yang digali dari berbagai sekolah dari dalam dan luar negeri yang jelas-jelas memiliki reputasi internasional. Guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial berataraf internasional serta kemampuan berkomunikasi secara internasional dan penguasaan ICT. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan profesional dalam manajemen, kepemimpinan, organisasi, administrasi, dan kewirausahaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SBI, termasuk kemampuan komunikasi dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Tenaga kependidikan, baik jumlah, kualifikasi maupun kompetensinya memadai untuk mendukung penyelenggaraan SBI. Sarana dan prasarana harus lengkap dan mutakhir untuk mendukung penyelenggaraan SBI, terutama yang

terkait langsung dengan proses pembelajaran. Organisasi, manajemen, dan administrasi SBI juga memadai untuk penyelenggaraan SBI, yaitu kejelasan pembagian tugas, fungsi dan koordinasi yang baik. Manajemen yang tangguh mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi. Administrasi rapi dengan pengaturan dan pen-dayagunaan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Lingkungan sekolah, baik fisik maupun non fisik sangat kondusif bagi penyelenggaraan SBI.

Proses penyelenggaraan SBI mampu mengakrabkan, menghayatkan dan menerapkan nilai-nilai, norma, standar, dan etika global yang menuntut kemampuan kerjasama lintas budaya dan bangsa. Selain itu, proses pembelajaran dalam SBI harus properubahan, bermatra individu, sosial, dan kultural. Bahasa Indonesia dan bahasa asing khususnya bahasa Inggris serta media pembelajaran yang variatif dan berteknologi mutakhir juga digunakan.

Menurut Depdiknas (2006:8), SBI harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang (1) mendukung keinginan

tahuan, (2) keterbukaan pada kemungkinan baru, (3) prioritas pada fasilitas kemerdekaan dan kreativitas dalam mencari jawaban atau pengetahuan baru, (4) pendekatan yang diwarnai eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan baru.

Output SBI memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional dan internasional yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP dan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang harus dimiliki dalam era global.

Evans & Edwin (1978:24) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Haris dalam Slamet (1990:2) menyatakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk suatu pekerjaan atau beberapa jenis pekerjaan yang disukai individu untuk kebutuhan sosialnya. Malik (1990:94) yang mengutip *House Committee on Education and Labour* (HCEL) bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada

dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Dari definisi tersebut terdapat satu pengertian yang bersifat universal seperti yang dinyatakan oleh *National Council for Research into Vocational Education* Amerika Serikat (NCRVE, 1981:15) yaitu bahwa pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja.

Dari batasan yang diajukan oleh Evans, Harris, HCEL, dan NCRVE tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri pendidikan kejuruan dan sekaligus membedakan dengan jenis pendidikanlain adalah orientasinya pada penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Agak berbeda dengan batasan yang diberikan oleh Evans, Harris, HCEL, dan NCRVE, Finch & Crunkilton (1984:161) menyebutkan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk bekerja guna menopang kehidupannya (*education for earning a living*).

Bertolak dari definisi yang diajukan oleh Evans, Harris,

HCEL, NCRVE maupun Finch & Crunkilton dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu, yang berarti pula mempersiapkan mereka agar dapat memperoleh kehidupan yang layak melalui pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing serta norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi guru bahasa Inggris SMK adalah memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis) serta menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

Kompetensi tersebut merupakan jabaran dari kompetensi inti pertama, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran bahasa Inggris yang merupakan bagian dari kompetensi profesional guru bahasa Inggris SMK

(BI). Kompetensi inti kedua adalah menguasai standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) bahasa Inggris, yang mencakup (1) memahami SK, (2) memahami KD, dan memahami tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Kompetensi inti ketiga adalah mengembangkan materi pembelajaran bahasa Inggris secara kreatif, yang mencakup (1) memilih materi pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, (2) mengolah materi pelajaran bahasa Inggris secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Kompetensi inti keempat dari kompetensi profesional adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kompetensi ini mencakup (1) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, (2) memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, (3) melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) untuk peningkatan keprofesionalan, dan (4) mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Kompetensi inti terakhir dari kompetensi profesional guru

bahasa Inggris SMK (BI) adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengembangkan diri. Kompetensi ini meliputi (1) memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi, dan (2) memanfaatkan TIK untuk pengembangan diri.

Selain memiliki kompetensi profesional sebagaimana dipaparkan di atas, guru bahasa Inggris SMK (BI) juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik mencakup sepuluh (10) kompetensi inti yaitu (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum bahasa Inggris, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi

proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Untuk kompetensi kepribadian, terdapat lima (5) kompetensi inti yaitu (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta (5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Sedangkan kompetensi sosial mencakup empat (4) kompetensi inti yaitu (1) bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, (3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya, dan (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

### **1. Pemberdayaan Guru pada Lembaga Pelatihan**

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa dua (2) lembaga pelatihan yang menjadi latar studi ini adalah LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Tengah di Jl. Kyai Maja Sronдол Kulon Semarang dan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bahasa di Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dengan visi menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berstandar nasional dan berwawasan global, LPMP Jawa Tengah mencanangkan enam (6) misi, yaitu (1) melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan SNP (Standar Nasional Pendidikan), (2) melaksanakan pemetaan mutu pendidikan

dasar dan menengah dalam pencapaian SNP di Jawa Tengah, (3) melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian SNP, (4) memfasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, (5) mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah, dan (6) menjalin kerjasama antar lembaga dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah.

Tujuan LPMP Jawa Tengah adalah terjaminnya pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan mencermati visi, misi, dan tujuan LPMP Jawa Tengah, terlihat dengan jelas bahwa pemberdayaan pendidik, termasuk guru bahasa Inggris SMK-RSBI menjadi tugas lembaga ini dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Tengah. Fasilitasi sumber daya pendidikan, khususnya tenaga pendidik ini dilakukan dalam bentuk pelatihan yang dibiayai

dengan dana APBN melalui LPMP, maupun dalam bentuk kerjasama yang diprakarsai oleh sekolah maupun dinas pendidikan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Pelatihan atau *workshop* dengan memanfaatkan dana APBN dapat dilaksanakan di LPMP Jawa Tengah, maupun menggunakan model *blockgrant* (bantuan langsung) ke MGMP masing-masing mata pelajaran.

Namun demikian, pemberdayaan pendidik/guru, termasuk guru bahasa Inggris SMK-RSBI yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah melalui pelatihan atau *workshop* di LPMP Jawa Tengah, maupun melalui *blockgrant* yang dilaksanakan oleh masing-masing MGMP mata pelajaran, termasuk MGMP bahasa Inggris SMK-RSBI masih bersifat parsial dan temporer. Parsial artinya, pelatihan dalam rangka pemberdayaan itu belum mencakup semua kompetensi yang sangat dibutuhkan guru, sehingga menjadikannya lebih berdaya. Sedangkan temporer artinya pemberdayaan melalui pelatihan itu dilakukan tergantung pada keberadaan dana yang tidak dapat dipastikan waktunya.

Hal yang sama juga terjadi di P4TK Bahasa Jakarta. Visinya adalah terwujudnya P4TK Bahasa sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang profesional dan berstandar internasional 2015. Visi tersebut dijabarkan menjadi enam (6) misi, yaitu (1) menjadikan P4TK Bahasa sebagai pusat pendidikan dan pelatihan PTK bahasa dan pusat inovasi pembelajaran bahasa, (2) menjadikan P4TK Bahasa sebagai *benchmark* standar pengembangan dan pemberdayaan PTK bahasa, (3) menciptakan pertumbuhan kapasitas SDM, manajemen, finansial, dan sarana prasarana P4TK Bahasa secara simultan, (4) mengembangkan kultur lembaga berbasis kinerja dan demokratis, (5) memberikan pelayanan berdasarkan prinsip terstandar dan profesional, (6) membangun jejaring kerja berskala nasional, regional, dan internasional.

Pemberdayaan PTK, termasuk guru bahasa Inggris SMK-RSBI melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh P4TK Bahasa Jakarta ini juga serupa dengan yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah yang

bersifat parsial dan temporer. Dengan keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dibutuhkan upaya konkrit pemberdayaan guru melalui pelatihan yang mampu mencakup keempat kompetensi yang harus dimiliki guru secara komprehensif.

## **2. Kompetensi Guru Bahasa Inggris SMK Bertaraf Internasional**

Terdapat 32 guru bahasa Inggris di empat (4) SMK BI di Kota Semarang, yaitu 7 orang di SMKN 4 Semarang, 7 orang di SMKN 6 Semarang, 7 orang di SMKN 7 Semarang dan 11 orang di SMKN 11 Semarang. Dari 32 orang tersebut, hanya 6 orang (18, 7%) yang dianggap memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sangat baik. Untuk kompetensi kepribadian dan sosial, semua guru telah dianggap memiliki kedua kompetensi tersebut dengan baik.

Dilihat dari kualifikasi akademiknya, dari 32 orang guru bahasa Inggris tersebut, 28 orang (87,5 %) merupakan sarjana (S1) di bidangnya dan sisanya, 4 orang (12,5%) sudah memiliki ijazah magister (S2).

Dengan demikian, jika dilihat dari syarat minimal kualifikasi akademik, guru-guru tersebut telah layak menjalankan tugas profesinya.

Meskipun belum menjamin sepenuhnya dan menjadi cerminan kompetensi profesional dan pedagogiknya, skor TOEIC (*Test of English for International Communication*) dari 32 orang guru bahasa Inggris tersebut memiliki rerata 460, 25. Padahal, berdasarkan instrumen evaluasi diri SMK BI, skor TOEIC guru bahasa Inggris dipersyaratkan lebih dari 550. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian dari pengambil kebijakan yang selanjutnya perlu dilakukan upaya konkrit untuk mencapai yang lebih baik.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan analisis kualitatif dan pembahasan studi dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) kedua lembaga pelatihan telah memiliki komitmen yang baik terkait dengan pemberdayaan tenaga pendidik/guru, termasuk guru bahasa Inggris SMK-RSBI, baik secara konseptual maupun operasionalnya, (2) pelatihan dalam rangka pemberdayaan guru

bahasa Inggris masih bersifat parsial dan temporer, (3) kepemilikan empat kompetensi yang harus dimiliki guru bahasa Inggris SMK-RSBI belum terwujud, (4) diperlukan pengembangan model pemberdayaan guru bahasa Inggris SMK-RSBI yang lebih baik.

## 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dikemukakan saran sebagai berikut: (1) lembaga-lembaga pelatihan guru, termasuk guru bahasa Inggris SMK RSBI perlu membuat perencanaan yang lebih matang dalam upaya melaksanakan pelatihan dalam rangka pemberdayaan guru, (2) para pimpinan SMK-RSBI perlu lebih mendorong para guru bahasa Inggris untuk mengembangkan kompetensinya, (3) diperlukan dukungan bagi upaya melakukan penelitian pengembangan model pemberdayaan guru bahasa Inggris SMK-RSBI.

## DAFTAR PUSTAKA

Ace, Suryadi. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta:Balai Pustaka.

Evans, R. N. & Edwin, L.H. 1978. *Foundation of Vocational*

*Education*. Columbus, OH:Charles E. Merrill Publishing Company.

Finch, Curtis R. & Crunkilton, John R. 1984. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education:Planning, Content, and Implementation*. Boston:Allyn and Bacon, Inc.

Harris, B.M. 1990. *Improving Staff Performance Through In-Service Education*. Massachusetts:Allyn and Bacon Inc.

Hartoyo. 2008. *Pemberdayaan Guru Sebagai Upaya Mewujudkan Guru Profesional*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan LPMP Jawa Tengah 10-13 November 2008.

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=panduan+penyusunan+ktsp&meta=.12-2008>).

Malik, Oemar H.1990. *Pendidikan tenaga kerja nasional, kejuruan, kewirausahaan, dan manajemen*. Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti.

Mukhtar. 2003. *Mengukir Prestasi. Panduan Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Misaka Galiza.

National Council for Research into Vocational Education (NCRVE). 1981. *Towards a theory of vocational educational*. Columbus, Ohio:NCRVE Publication.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta:Departemen pendidikan Nasional.

Slamet. 1990. *Pondasi pendidikan kejuruan. Lembaran perkuliahan*. Yogyakarta : Pascasarjana IKIP Yogyakarta.

Slamet. 2008. *Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional*. Bahan kuliah. Yogyakarta:PPs UNY Yogyakarta

Suparlan. 2008. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta:HIKAYAT Publishing

Suyanto. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta:Adi Cita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan*

*Nasional*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional

-----, 2008. *Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dampak Guru Tersertifikasi Terhadap Pengembangan Profesionalisme*. Semarang:LPMP Jawa Tengah

-----, 2007. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.

-----, 2007. *Instrumen Induk Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.

-----, 2006. *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.

-----,2005. *Laporan Program Diklat Guru SMK Penerima Subsidi Imbal Swadaya Pemberdayaan SMK Berstandar Nasional Mata Diklat Bahasa Inggris*. Semarang:LPMP Jawa Tengah